

STRATEGI PENINGKATAN KESIAPAN KERJA LULUSAN PERGURUAN TINGGI DI ERA PASAR BEBAS

Oleh: F. Winarni*)

ABSTRACT

Indonesia's involvement in the era of economic globalization has brought about the consequence of participating in the ratification of the WTO agreement known as the Marrakech Declaration, which concerns the principles enforced in the free trade. Along with industrial developments, there have come into existence various occupation and job qualifications requiring new skills and expertise to support scientific and technological developments. As a further consequence, there would occur a shift in work values in company management. In the aspect of manufacturing activity, there would be a shift from high-volume to high-value production.

To anticipate job market needs with a view on the reality of the quality of our education, it is necessary to prepare a suitable strategy in developing human resources through education and training. With the newly-available opportunities as points of departure, universities as agents of improvement should be able to produce a work force not only skilful but also of high intelligence, profound reliability, and strong personality in order to be able to compete abroad. There need to be efforts to implement in any process in the education and training

*) Penulis adalah dosen FIS Universitas Negeri Yogyakarta

involving communication of information and teaching-learning interaction a strategy incorporating a dynamic and dialogic atmosphere.

Key Words: job readiness strategy

PENDAHULUAN

Era perdagangan bebas pada globalisasi abad XXI membawa banyak tantangan terhadap perguruan tinggi dalam menyikapi penyediaan SDM yang berkualitas. Globalisasi dalam makna yang luas merupakan transformasi sosial budaya dalam lingkup global (Dahlan, 1995: 36). Sudibyo (1995: 4) merumuskan globalisasi sebagai proses semakin menghilangnya atau menyusutnya semua jenis dan bentuk hambatan terhadap arus manusia, barang, jasa, dan informasi pada tingkat mondial. Dalam lingkungan yang seperti itu kompetisi untuk *survival* menjadi semakin tajam dan terbuka. Entitas apapun - orang, penduduk, perusahaan, negara dan sebagainya yang paling kompetitif adalah yang paling stabil dan efisien.

Keterlibatan Indonesia dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan tidak bisa dihindari. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap harus dihadapi. Untuk itulah negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) telah melakukan kerja sama AFTA (*Asean Free Trade Association*), bahkan dengan negara Asia-Pasifik lainnya menjalin kerjasama ekonomi APEC (*Asia Pacific Economy Corporation*). Semua ini merupakan langkah menuju ke arah globalisasi ekonomi 2020.

Beberapa hal yang perlu disimak dari konsekuensi keterlibatan Indonesia pada pasar bebas, yakni disepakatinya beberapa prinsip yang berlaku di semua anggota *World Trade Organization* (WTO) yang

dikenal dengan prinsip-prinsip Deklarasi Marrakesh (Nopirin, 1996) sebagai berikut:

1. *cross boarder*, artinya eksportir/produsen bebas masuk ke satu negara,
2. *consumption abroad*, artinya setiap orang atau konsumen bebas membeli barang dan jasa termasuk dari luar negeri (impor),
3. *comercial presence*, artinya setiap orang bebas mendirikan pabrik, kantor atau perwakilan di negara lain,
4. *presence of natural person*, artinya setiap orang bebas untuk berusaha di negara lain,
5. *most favoured nation*, yakni tidak ada perlakuan yang berbeda atau istimewa terhadap negara lain, dan
6. *national treatment*, artinya perlakuan produsen luar negeri sama dengan produsen dalam negeri.

Dengan prinsip-prinsip di atas, batas-batas negara (dalam arti ekonomi) tidak ada lagi. Barang dan jasa dapat bebas ke luar masuk suatu negara. Ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia seolah-olah tanpa batas. Inilah yang sering diartikan dengan era globalisasi (era kesejagatan). Indonesia telah ikut meratifikasi kesepakatan WTO tersebut sehingga tidak bisa menghindar lagi dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Untuk mengantisipasi pelaksanaan pasar bebas dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, bangsa Indonesia harus menyiapkan Sumber Daya Manusianya (SDM) agar dapat tetap *survival* dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini akan membahas upaya atau strategi yang perlu dipersiapkan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas lulusannya menghadapi tantangan pasar kerja di era pasar bebas.

KARAKTERISTIK TENAGA KERJA DI ERA PASAR BEBAS

Dalam era industrialisasi dan teknologi diperkirakan akan terjadi transformasi masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Perkembangan industri mengakibatkan munculnya jenis pekerjaan dan kualifikasi jabatan yang semakin beraneka ragam dan memerlukan jenis keterampilan dan keahlian baru sesuai dengan perkembangan Iptek. Jabatan dengan keahlian yang semakin beraneka ragam ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai bentuk perubahan fisik, pranata sosial, dan pergeseran sistem nilai. Dengan demikian, tidak mengherankan jika dalam masyarakat Indonesia juga akan terjadi benturan antara nilai-nilai tradisional yang melekat pada budaya agraris dengan nilai-nilai budaya industri yang baru berkembang pada sebagian kecil masyarakat.

Globalisasi juga akan mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi, dan sosial-budaya antarbangsa menjadi kabur, dan persaingan antarbangsa yang semakin tajam, terutama dalam bidang ekonomi serta dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang unggul dalam penguasaan Iptek akan mengambil manfaat besar dari proses ini.

Pergeseran-pergeseran yang relevan dibicarakan dalam kaitannya dengan topik di atas antara lain pergeseran nilai-nilai kerja dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Neisbitt dan Aburdene seperti dikutip Asa'ad (1996: 1) pergeseran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. pergeseran dari masyarakat industri berubah menjadi masyarakat informasi,
2. pergeseran dari teknologi yang menggunakan banyak manusia (*forced technology*), menjadi teknologi yang tinggi dan teknologi tekan tombol (*high tech & High Touch*).
3. pergeseran dari ekonomi nasional menjadi ekonomi dunia, dan

4. pergeseran dari perencanaan jangka pendek ke arah perencanaan jangka panjang.

Toffler dalam Asa'ad (1996: 1) melihat pergeseran tersebut dari aspek manajemen sebagai berikut:

1. berubahnya sifat organisasi dari hierarkhis menjadi jaringan (*networking*),
2. peranan institusi yang sangat dominan di dalam menentukan keputusan kini bergeser pada individu (*empowerment*),
3. gaya kerja organisasi yang sangat kaku berubah menjadi fleksibel,
4. orientasi bisnis yang sebelumnya mengacu pada *self sufficiency*, kini bergeser pada saling ketergantungan (*interdependencies*),
5. orientasi karyawan dalam bekerja bergeser dari orientasi untuk memperoleh rasa aman (*security*) menjadi orientasi yang mengarah pada pengembangan diri (*personal growth*); dari pengejaran status ke melebihi prestasi orang lain,
6. kekuatan sumberdaya bergeser dari pemilikan uang tunai dalam jumlah besar kepada pemilikan informasi,
7. orientasi kerja dari motivasi menyelesaikan pekerjaan ke arah orientasi membangun sesuatu yang baru, dan
8. kultur perusahaan mengarah ke keberanian menghadapi risiko.

Berdasarkan arah pergeseran paradigma bisnis dan manajemen SDM seperti dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik tenaga kerja yang diperlukan pada era pasar bebas nanti, yakni suatu kualitas yang berorientasi pada *trend* paradigma yang berlaku atau diterima dalam situasi tersebut. Dari aspek kegiatan *manufacturing*, dengan meningkatnya sektor jasa memasuki era pasar bebas, akan terjadi pergeseran dari penekanan pada "*high-volume*" ke pengutamaan "*high-value production*" (Reich dalam Tilaar, 1991:3). *High-volume produc-*

tion adalah cara memproduksi yang menghasilkan komoditi yang baku, rutin, seragam, dan massal. Sementara itu, *high-value production* adalah cara memproduksi sebaliknya, yaitu menghasilkan produksi dan melayani kebutuhan khas sesuai permintaan konsumen tertentu.

Kecakapan dan kemampuan yang mendasari perkembangan bisnis "*high-value*" terdiri tiga jenis sebagai berikut.

1. Kecakapan *problem-solving*, yaitu kecakapan untuk menggabungkan beberapa hal secara unik. Untuk itu, ia harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai riset, rekayasa dan desain yang serba khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Mereka selalu berusaha menemukan cara penerapan baru, kombinasi baru dan berbagai perbaikan yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah.
2. Kecakapan *problem-identification*, yaitu kecakapan untuk membantu konsumen mengerti yang mereka perlukan dan bagaimana kebutuhan itu bisa dipenuhi melalui produk yang dibuat sesuai permintaan. Untuk itu ia harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bisnis para pelanggannya dan bagaimana meningkatkannya. Kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah baru dan kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dilakukan oleh produk yang ditawarkannya merupakan kunci kesuksesannya.
3. Kecakapan *strategic brokering*, yaitu kecakapan untuk menghubungkan *problem-solvers* dan *problem-identifier*. Untuk itu, harus dimiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang teknologi dan pasar khusus agar bisa melihat potensi bagi penciptaan produk baru, mencari pendanaan yang diperlukan untuk melakukan penciptaan produk baru itu, dan mempertemukan *problem-solvers* dan *problem-identifiers* yang tepat untuk menjalankan proyek baru itu. Peran mereka bukan mengendalikan organisasi, tetapi berfungsi mengelola gagasan.

Pemahaman prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerja dalam era pasar bebas membawa implikasi terhadap penyiapan strategi yang tepat bagi pengembangan SDM melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Peran pendidikan menjadi penting dan urgen dibahas karena dengan pendidikanlah SDM mendapat bekal pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai, serta prinsip-prinsip lain yang diperlukan dalam kerja secara tepat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dendi (1996: 3) yang mengatakan bahwa agar dapat memenuhi pasar kerja di era pasar bebas, tenaga kerja harus selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengimbangi permintaan pasar yang terfragmentasi secara cepat.

Dilihat dari sudut organisasi, era globalisasi atau perubahan ini menjadikan organisasi tidak terlalu terikat sekali oleh struktur, tetapi organisasi dipengaruhi oleh kemajuan adanya teknologi informasi. Menurut Lawrence Miller (dalam Warsito Utomo, 2000: 4) tantangan baru yang dihadapi oleh manajemen antara lain terjadinya perubahan dari motivasi materi kepada motivasi spiritual, sifat pekerjaan tidak lagi fisik tetapi lebih bersifat kognitif, manajemen intimidasi telah berubah kepada manajemen dengan keterlibatan serta dorongan positif. Untuk merespon tuntutan perubahan pada era global yang bertumpu pada *Information Technology* (IT) menurut Warsito Utomo (2000: 4) diperlukan 8 nilai atau azas yang perlu diperhatikan, yakni tujuan, konsensus, keunggulan, kesatuan, prestasi, empirisme, keakraban dan integritas.

Untuk mengimbangi permintaan pasar yang terfragmentasi secara cepat, setiap perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang berkualitas menurut Alvin Toffler (dalam Dendi, 1996: 3) harus menumbuhkan inovasi aditif dan inovasi substantif yakni suatu kemampuan untuk belajar melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya serta meneruskannya secara konsisten, atau belajar untuk tidak melakukan sesuatu yang pernah dilakukan

sebelumnya serta tidak meneruskannya secara konsisten. Dengan tambahan pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, maka seseorang akan mampu menciptakan suatu pembaharuan baik dalam bentuk proses kerja maupun bentuk produk barang atau jasa tertentu. Sebagai misal dilakukan dengan memperbanyak model, ukuran, gaya dan variasi pelayanan yang unik pada rantai produksinya, serta menciptakan produk, teknologi, proses atau pun produser baru untuk menggantikan yang lama, yang telah usang. Agar dapat memiliki kemampuan aditif dan inovatif tersebut, maka dalam proses belajar diperlukan kemampuan dinamis dan relevan dengan dunia kerja. Artinya dengan dasar yang kuat setiap peserta didik sanggup menjadi otodidak. Dengan kemampuan inovasi kreatif yang dimilikinya, peserta didik akan memiliki potensi dan peluang melakukan mobilitas kerja, dengan alih profesi atau jenis pekerjaan.

Tumbuh dan berkembangnya kemampuan-kemampuan tersebut pada peserta didik diperlukan adanya prasyarat pendukung baik yang berasal dari peserta didik itu sendiri, masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang ada baik privat maupun publik. Menurut Rake (1998: 2) faktor-faktor pendukung tersebut adalah penguasaan pengetahuan, kemampuan inovasi, kapasitas dan semangat belajar, ketanggapan, adaptabilitas-fleksibilitas, kecepatan bertindak, keberdayaan masyarakat dan birokrasi yang bersih dan efisien.

Peranan pendidikan sangat strategik dalam menentukan keberhasilan seseorang. Pendidikan sebagai pranata utama pembangunan sumberdaya manusia harus secara jelas berperan membentuk peserta didik menjadi aset bangsa, yaitu menjadi manusia produktif, kreatif dan berprestasi yang mampu menciptakan produk unggul industri Indonesia yang siap menghadapi persaingan pada pasar bebas.

KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Beberapa pertanyaan berkaitan dengan peranan pendidikan dalam upaya pembinaan SDM yang perlu mendapatkan jawaban yaitu bagaimana sistem pendidikan yang ada baik formal maupun non formal mengantisipasi, dan sejauh mana perusahaan baik swasta maupun pemerintah menerapkan pengembangan SDM secara profesional?.

Realita menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia masih terbatas seperti kultur sosial, sistem pendidikan yang kurang responsif, birokrasi yang panjang dan kaku, tingkat kesadaran akan pendidikan relatif rendah. Menurut Supriyanto (1996: 16) beberapa keterbatasan tersebut turut andil dalam mendukung belum terlaksananya penerapan kriteria profesionalitas seperti kemampuan teknis, semangat/kemauan kerja tinggi dan memiliki etika bisnis; maupun kriteria manajemen modern lainnya, antara lain seperti berorientasi ke pasar dan penerapan perencanaan strategis secara komprehensif.

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai rambu-rambu untuk menentukan kualitas pendidikan menurut Tilaar (1991: 5) antara lain mutu lulusan guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan dan alat-alat bantu proses belajar-mengajar seperti buku teks, peralatan laboratorium dan bengkel kerja yang belum memadai. Hal tersebut memang tergantung pada besarnya biaya yang diperuntukkan bagi pendidikan per-unit, maupun alokasi dana bagi pendidikan dari APBN/APBD.

Masalah kualitas pendidikan erat pula kaitannya dengan relevansi pendidikan yang sering disebut dengan efisiensi eksternal (Tilaar: 6) yakni kemampuan sistem pendidikan untuk memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor-sektor pembangunan. Menurut Suyanto (1993: 6) efisiensi eksternal ini penting karena berkaitan dengan sejauh mana para lulusan program studi mampu

berperilaku profesional sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Berdasarkan data statistik pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan penganggur menurut tingkat pendidikan tahun 1980 dan 1990 (Tilar, 1991: 7; Nurhadi, 1995: 9), dan apabila kita lihat kecenderungan lulusan pendidikan kita tampak gejala semakin tinggi pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk menganggur.

Masalah relevansi pendidikan kita dapat dinyatakan bahwa berdasarkan evaluasi sistem pendidikan dan latihan selama 15 tahun terakhir diolah kembali oleh Tilaar (1991: 7) bukan saja disebabkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran oleh berbagai sektor lapangan kerja, tetapi juga karena isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah beban kurikulum sekolah-sekolah terkenal sangat sarat dengan berbagai macam mata pelajaran sehingga sangat mendera peserta didik. Dalam era informasi hal ini menjadi berlebihan. Proliferasi ilmu bukan berarti penambahan beban kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana cara kita dapat menguasai informasi sebanyak dan setepat mungkin.

Ditinjau dari beberapa aspek pendidikan di atas dan melihat realita yang objektif memang harus diakui bahwa kualitas pendidikan kita masih jauh dari kebutuhan kualitas yang diharapkan. Bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam mengantisipasi tantangan SDM kita menjelang era pasar bebas merupakan masalah yang perlu dibahas secara mendalam.

ANTISIPASI PENDIDIKAN TERHADAP TRANSFORMASI DUNIA KERJA MENUJU ERA PASAR BEBAS

Terdapat peluang yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi seperti Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (FIS-UNY)

untuk dapat berkiprah secara kreatif dan inovatif. Dalam kurikulum 1995 bidang keahlian khusus Administrasi Perkantoran (ADP), dan kurikulum-kurikulum sebelumnya terdapat mata kuliah pokok dan pengembangan yang sangat kondusif dengan profesi nonkeguruan (Administrasi, Manajemen, Kepemimpinan, Organisasi, Manajemen Perkantoran, Manajemen Keuangan dan sebagainya). Mata kuliah tersebut merupakan unggulan kompetitif program studi ADP dibanding program studi lain.

Mata kuliah lain di beberapa program studi baik yang diselenggarakan di UNY maupun di luar UNY seperti Etika, Pengembangan Diri, *Public Speaking*, *Public Relation*, Perbankan, Kewirausahaan, Kepariwisata, Aplikasi Komputer, Sistem Informasi Manajemen, Teknik Presentasi, dan lain-lainnya, juga merupakan suatu tawaran penambahan kemampuan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja secara riil.

Berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan bebas, dapat dipastikan adanya rencana kebutuhan tenaga kerja industri yang cukup besar pada masa mendatang dengan kualifikasi manajer, supervisi, tenaga staf, sekretaris, tenaga keuangan dan lain-lainnya. Lembaga pendidikan memiliki tugas penting dalam rangka menyiapkan tenaga kerja baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan seperti yang diharapkan oleh pasar kerja. Untuk itu, perlu diadakan relevansi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemakai produk lulusan.

Peluang-peluang tersebut dapat dijadikan pangkal tolak peningkatan efisiensi internal dan eksternal yang tinggi. Efisiensi internal berkaitan dengan produktivitas program studi dalam meluluskan mahasiswa, sedangkan efisiensi eksternal berkaitan dengan sejauhmana para lulusan program studi mampu berperilaku profesional sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Dalam kaitannya dengan kontribusi perguruan tinggi dalam rangka menyediakan dan membina SDM yang berorientasi kerja di pasar bebas,

efisiensi eksternal ini perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan rendahnya efisiensi eksternal lulusan suatu perguruan tinggi tidak dapat bersaing di dunia kerja. Secara kurikuler hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan, namun kendala dapat diatasi bila para dosen mampu mengajarkan dan mengembangkan pengetahuan yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja bagi para mahasiswanya. Dengan dikuasainya pengetahuan yang relevan dengan dunia bisnis, para lulusan diharapkan dapat bersaing di lapangan kerja sektor industri.

Mahasiswa akan memiliki kesiapan kerja dalam bidang bisnis apabila dapat mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan informasi yang diperoleh sebagai pengalaman belajar ke situasi nyata dalam dunia kerja. Dalam situasi yang baru lulusan dituntut dapat melakukan analisis dan sintesis terhadap situasi dengan tuntutan dunia kerja yang ada sehingga dicapai tingkat kemampuan yang diperlukan dalam *high-value production*. Keadaan semacam ini oleh Bruner seperti dikutip Suyanto (1993: 8) disebut sebagai peristiwa *transfer of learning dan transfer of principles*.

Kondisi tersebut akan terjadi jika proses belajar yang berlangsung tidak sekedar berupa pemupukan informasi dan pengetahuan yang tidak fungsional, tetapi proses pembelajaran yang dinamis dan dialogis. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran yang dinamis dan dialogis adalah proses belajar yang tidak statis, tidak monoton, arah komunikasi multiarah, dan aktual. Dalam proses belajar mahasiswa harus diberi kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kemampuan bernalar guna memperoleh konsep-konsep mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya, menguji hipotesis dalam situasi baru dan menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat data. Dengan demikian, para mahasiswa dapat berkurang beban belajar yang berlebih dan perlu diperbanyak kegiatan diskusi untuk melatih berpikir kritis. Dengan berpikir kritis akhirnya mereka dapat mengantisipasi dunia kerja baik

dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan pada umumnya dan dunia bisnis pada khususnya.

Pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran yang menyangkut komunikasi informasi dan interaksi belajar-mengajar dalam suasana dinamis dan dialogis memerlukan kiat-kiat pendukung. Menurut Johar (1996: 3) kiat-kiat pendukung yang termasuk di dalam masalah komunikasi informasi di antaranya mencakup:

- (1) penguasaan materi yang diinformasikan yakni bidang ilmu yang dibina,
- (2) keterampilan memburu referensi,
- (3) kemampuan dan keterampilan menguasai informasi baru,
- (4) kemampuan menangkap informasi dan menyatukan konsep dalam struktur kognitifnya, dan
- (5) kemampuan memproduksi informasi sesuai dengan keperluan dan situasi.

Sementara itu, kiat pendukung yang termasuk ke dalam masalah interaksi belajar-mengajar, antara lain:

- (1) menguasai unsur-unsur komunikasi di atas,
- (2) menguasai karakteristik subyek belajar atau klien,
- (3) menguasai situasi belajar,
- (4) menguasai media belajar,
- (5) menguasai keberhasilan dan kegagalan proses belajar-mengajar,
- (6) mampu mengembangkan alternatif pendekatan dan cara belajar-mengajar, dan
- (7) mampu menyatukan diri dengan situasi dan subyek belajar.

Apabila komponen-komponen tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, tugas lembaga pendidikan untuk mengantisipasi

era pasar bebas dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan pendidikan dalam aspek kognitif, pengembangan kemampuan bisnis dapat diarahkan pada pengembangan kemampuan analitis mahasiswa dengan ranah pengetahuan ilmu sosial. Kandungan ilmu sosial yang dimaksud di sini berkaitan dengan pemahaman sistem sosial, geografi, ekonomi, manajemen, pemasaran, keuangan perusahaan, kewirausahaan, perbankan, dan sebagainya.

Penghayatan etika bisnis dapat dilakukan dengan menghadapkan dunia bisnis dengan berbagai konsep dalam filsafat sosial yang merupakan sumber pemahaman konsep tentang manusia, kebenaran, kekuasaan, dan tujuan sosial. Sementara itu, aspek keterampilan berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan.

Sebagai alternatif terakhir strategi perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing kerja lulusannya dalam bidang nonkependidikan adalah melalui pelaksanaan kurikulum fleksibel. Kurikulum fleksibel merupakan suatu pendekatan perbaikan menuju ke arah terciptanya lulusan yang mempunyai kesempatan yang terbuka untuk terjun ke dunia kerja. Ini berarti bahwa dalam kurikulum fleksibel program-program yang disajikan dalam bentuk kemampuan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa harus dapat memberikan pilihan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih berbagai kemungkinan rumusan program studi, baik berdasarkan kemampuan maupun minatnya (Abdullah, 1992). Dengan kemampuan yang lebih luwes, lulusan tidak hanya terpaku pada satu kemungkinan yang sempit sebagaimana yang dialami oleh lulusan LPK dewasa ini. Operasional dari kurikulum fleksibel ini adalah mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah utama (major) untuk setiap bidang studi sebagaimana yang telah ditetapkan. Di samping itu, mahasiswa diberi kebebasan mengambil mata kuliah tambahan (minor) pada jurusan lain yang paling sesuai dengan tujuan dan minatnya. Dalam penjabarannya dapat

dilakukan suatu peninjauan terhadap paket materi pelajaran yang berorientasi global untuk dimasukkan dalam materi tambahan kewenangan II.

Pola penyesuaian kebutuhan materi bidang studi dalam menghadapi tantangan pasar kerja era pasar bebas, di samping dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal, juga dapat dilakukan melalui jalur nonformal. Hal itu antara lain dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar ataupun pelatihan yang melibatkan unsur praktisi dan teoritis pada lembaga-lembaga pendidikan terkait.

Fungsi pendidikan yang berkaitan dengan tugas preparatoris-antisipatif ini memang tidak mudah. Bahkan, orang yang pesimis seperti Isaac Asinow seperti dikutip Tilaar (1991: 34) mengatakan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan sebab pada masa depan adalah masa dengan banyak kemungkinan. Namun, skenario masyarakat pada masa depan dapat diantisipasi berdasarkan analisis kecenderungan yang ada atau bakal ada.

Masyarakat industri modern menuntut berbagai kemampuan dan sikap yang perlu dikembangkan. Untuk dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat di era pasar bebas, pelaksanaan pendidikan yang selama ini berlangsung harus diubah sehingga kondusif dengan nilai-nilai masa depan.

MANAJEMEN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

Pada perkembangan ke depan perguruan tinggi bukan hanya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi diharapkan juga harus berfungsi sebagai pusat pengembangan kapasitas pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*) dan pusat pengembangan kapasitas kepemimpinan. Oleh karena itu, orientasi pendidikan juga harus berubah dari *teaching* menjadi *learning* (Sofian Effendi, Bernas, 20 Sept 2002). Hal ini harus dilakukan

agar para lulusan selalu mampu menyikapi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dengan kecepatan yang semakin tinggi.

Agar tuntutan perubahan orientasi tersebut dapat tercapai, pendidikan itu harus dikelola secara profesional. Dengan adanya manajemen yang profesional pada pengelolaan perguruan tinggi dapat dilakukan terobosan-terobosan yang mampu membawa perubahan sesuai dengan tuntutan pasar mengingat bahwa permasalahan pendidikan di era pasar bebas sangat kompleks. Sebagai sebuah organisasi profesional yang hasil dan dampaknya bagi masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja sivitas akademika yang ditandai oleh kreativitas dan ingenuitas, di dalam pengelolaannya diperlukan adanya suasana yang berbeda dari industri manufaktur, misalnya, dengan kualitas kerja yang sangat ditentukan oleh ketepatan melaksanakan prosedur yang menyangkut cara, urutan dan waktu.

Permasalahan-permasalahan pendidikan menurut Tilaar (1991: 9) menyangkut bukan saja masalah-masalah teknis pendidikan, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pendanaan, dan efisiensi dari sistem itu sendiri. Penelaahan dan pengalaman lapangan menyimpulkan bahwa kreativitas, ingenuitas dan produktivitas yang profesional lebih terangsang oleh pola kerja yang luwes dan mandiri daripada pola kerja yang berstruktur secara kaku. Menurut Soepangkat (1997: 3) ada lima komponen acuan dasar yang saling terkait dalam paradigma baru sistem pengelolaan perguruan tinggi meliputi otonomi, akuntabilitas, akreditasi, evaluasi dan peningkatan kualitas hasil dan kinerja perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Asas otonomi dengan kebebasan akademik secara resmi dinyatakan dalam UU No.2 Tahun 1989 serta PP No.30 Tahun 1990. Dalam aktualisasinya hal itu bukan suatu kebebasan yang tidak terbatas. Azas otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi antara lain tercermin dalam bentuk kebebasan untuk memilih staf akademik yang sesuai tujuan, memilih dan menetapkan mahasiswa, menetapkan standar

akademik serta kurikulum bagi program studi yang diselenggarakannya, menetapkan program penelitian yang dilakukan sivitas akademika, dan dalam batas tertentu memanfaatkan sumberdaya secara mandiri dalam penyelenggaraan fungsionalnya.

Meskipun dikelola secara otonomi, pelaksanaan perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat harus disertai pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Secara harafiah pertanggungjawaban tersebut menyangkut bagaimana sumberdaya yang diterima oleh perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Pertanggungjawaban menyangkut derajat kehematan, kesesuaian dengan norma dan peraturan yang berlaku umum serta keterbukaan terhadap penilikan dan pemantauan oleh pihak yang berkepentingan mengenai penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kualitas kinerja suatu perguruan tinggi selain diperlukan bagi penyelenggara perguruan tinggi, juga diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga privat dan publik sebagai penyandang sumberdaya yang memungkinkan terselenggaranya perguruan tinggi. Agar diperoleh informasi tentang kinerja perguruan tinggi tersebut, Badan Akreditasi Nasional yang dibentuk tahun 1994 sangat berkepentingan untuk melakukan evaluasi kinerja setiap perguruan tinggi dengan mengembangkan peraturan dan kriteria yang sama atau yang sering disebut akreditasi PTN dan PTS. Hasil dari akreditasi ini selain merupakan informasi pada masyarakat mengenai kualitas kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan, juga merupakan dasar pembinaan bagi pemerintah agar selalu diperoleh peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila program pengembangan dapat direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan kemauan yang sepadan serta senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu, setiap perguruan tinggi harus dapat melakukan evaluasi diri atau pengenalan diri mengenai kualitas kerjanya. Evaluasi diri dapat dinyatakan sebagai

upaya yang sistematis untuk menghimpun, menyusun dan mengolah data serta informasi yang handal dan sah yang dapat digunakan sebagai landasan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga maupun program. Hasil evaluasi diri ini akan menjadi bahan bagi BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

Kemampuan melaksanakan evaluasi diri ini harus dikembangkan di seluruh unit kerja perguruan tinggi tersebut, dari tingkat Universitas/Institut, Fakultas, Jurusan dan di bawahnya. Dengan demikian, setiap unit kerja dapat mengenali dirinya, potensi dan kelemahannya, kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat menyusun program kerja berikutnya yang merujuk pada proses peningkatan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam era globalisasi tidak akan ada lagi berbagai proteksi, baik di sektor produksi maupun sektor ketenagakerjaan. Lembaga pendidikan dituntut mampu menciptakan calon-calon tenaga kerja yang tidak hanya terampil, melainkan juga berintelegensia tinggi, handal, serta berkepribadian, sehingga dapat berkompetisi ke manca negara.

Berdasarkan arah paradigma bisnis dan manajemen SDM yang berlaku di era pasar bebas dalam bidang *manufacturing* lebih diorientasikan pada *high-value production* yakni pelayanan kebutuhan khas sesuai permintaan konsumen tertentu. Kecakapan dan kemampuan yang diperlukan berdasarkan konsep *high-value production* adalah kecakapan *problem solving*, *problem identification*, dan kecakapan *strategic brokering*.

Untuk dapat mencapai kualitas lulusan perguruan tinggi seperti diharapkan di atas, diperlukan adanya kiat atau strategi dalam proses pendidikan dan pengajaran yang menyangkut komunikasi dan interaksi belajar mengajar dalam suasana dinamis dan dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (1992). *Kurikulum Fleksibel: Suatu Pendekatan Pengembangan Kurikulum Berdasarkan Inti Topik Bidang Studi*. Yogyakarta: FPOK UNY.
- Asa'ad, M. (1996) *Sumberdaya Manusia Pariwisata di Indonesia di Indonesia : Tantangan Abad 21*. Yogyakarta: AMTA.
- Dahlan, A. (1995). "Tantangan PT Era Keterbukaan: Globalisasi Informasi dan Sosial Budaya", *Kajian Dikbud*, No. 002, Th.1, Desember 1995.
- Dendi, H. (1996). *Karakteristik Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan pada Era Pasar Global*. Yogyakarta: FPTK IKIP Yogyakarta.
- Johar. (1996). *Pengembangan Tugas Akademik Yang Kreatif Dan Produktif Bagi Dosen*. Yogyakarta: WSPK IKIP Yogyakarta.
- Nurhadi, M. A. (1995). *Perencanaan Pendidikan Menghadapi Tantangan Masa Depan (Tahun 2020)*. Makalah Seminar HIPIIS Cabang Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 1995.
- Nopirin. (1996). *Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Yogyakarta: BP7.
- Sudibyo, B. (1995). *Kualitas Manajer Profesional Menjelang Era Pasar Bebas*. Makalah Seminar HIPIIS Cabang Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 1995.
- Supriyanto, J. (1996). *Pengadaan Sumberdaya Manusia Pariwisata Menjelang Abad XXI*. Yogyakarta: AMTA.
- Suyanto. (1993). *Kesiapan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi FPIPS IKIP Yogyakarta untuk Bekerja di Sektor Non-Kependidikan*. Yogyakarta: Lemlit IKIP.

- Soepangkat, H.J. (1997). *Strategi Menuju Otonomi dan Akuntabilitas Perguruan Tinggi*. Semiloka Nasional Peningkatan Manajemen Perguruan Tinggi. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta 15-16 September 1997.
- Tilaar, H.A.R. (1991). *Sistem Pendidikan Nasional Yang Kondusif Bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Konggres Ilmu Pengetahuan Sosial Nasional V.
- Utomo, W. (2000). *Manajemen Strategis bagi Sekretaris Profesional dalam Membentuk Citra Manajemen Bisnis Modern*. Yogyakarta : ASMI Santa Maria.